

6-30-1999

SISTEM EKONOMI ALTERNATIF : REFLEKSI ATAS PANDANGAN IBNU TAMIYA SAMPAI KARL MARX Overview

Suhaedi Suhaedi

Follow this and additional works at: <https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb>

Recommended Citation

Suhaedi, Suhaedi (1999) "SISTEM EKONOMI ALTERNATIF : REFLEKSI ATAS PANDANGAN IBNU TAMIYA SAMPAI KARL MARX Overview," *Bulletin of Monetary Economics and Banking*: Vol. 2: No. 1, Article 1.

DOI: <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i1.194>

Available at: <https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol2/iss1/1>

This Article is brought to you for free and open access by Bulletin of Monetary Economics and Banking. It has been accepted for inclusion in Bulletin of Monetary Economics and Banking by an authorized editor of Bulletin of Monetary Economics and Banking. For more information, please contact bmebjournal@gmail.com.

**SISTEM EKONOMI ALTERNATIF :
REFLEKSI ATAS PANDANGAN IBNU TAMIYA
SAMPAI KARL MARX**

Overview

*Suhaedi *)*

Pada awal krisis, paling tidak sampai dengan bulan kuartal ketiga 1997, keyakinan dan optimisme mengenai kondisi perekonomian Indonesia masih tinggi. Hal ini antara lain terlihat pada saat pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Hong Kong bulan September 1997, di mana delegasi Indonesia masih menerima pujian dari pimpinan kedua lembaga keuangan internasional tersebut serta sejumlah investor. Kondisi fundamental perekonomian Indonesia diyakini berbeda dan lebih baik dari negara lain yang sedang mengalami krisis serupa. Dalam suasana yang penuh optimisme tersebut, pemikiran untuk meninjau kembali sistem ekonomi yang diterapkan belum mendapat perhatian.

Namun, ternyata krisis ekonomi di Indonesia lebih dalam dan lebih berat. Banyak pandangan telah dikemukakan oleh para pakar mengenai akar permasalahannya. Kondisi sektor keuangan yang rapuh, pengelolaan usaha yang kurang baik, ketergantungan sumber daya luar negeri yang tinggi, merupakan beberapa faktor yang sering dikemukakan sebagai penyebab krisis. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah antara lain melalui restrukturisasi dan penyehatan perbankan dan penyelesaian utang kepada kreditur dalam dan luar negeri, juga diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Di samping mengikuti alur pikir yang relatif "baku" tersebut, sebagian kalangan juga mempertanyakan apakah apakah sistem ekonomi yang kita tempuh selama ini sudah tepat untuk mewujudkan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Secara konstitusi, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan yang sering diartikan sebagai pengutamakan peranan koperasi dalam perekonomian nasional. Di sisi lain, banyak argumen yang dikemukakan oleh sejumlah kalangan bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi selama ini lebih cenderung ke arah liberal kapitalis - yang ternyata juga memiliki kelemahan-kelemahan termasuk dalam menghadapi gejolak. Kondisi obyektif inilah, barangkali, yang mendorong para penulis dalam edisi ini untuk mengajukan gagasan mengenai sistem ekonomi alternatif yang dapat memperkaya wacana bagi perbaikan strategi kebijakan ekonomi nasional, termasuk dalam penyelesaian krisis ekonomi. Dalam edisi ini,

*) Suhaedi : Peneliti Ekonomi, Bagian Studi Struktur dan Perkembangan Pasar Keuangan, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia. Email : suhaedi@bi.go.id

dua artikel mengulas mengenai sistem ekonomi yang menempatkan agama sebagai fundamen, dua artikel membahas kemungkinan penerapan sistem ekonomi sosialis yang mendasarkan pada pasar, dan satu artikel mengenai upaya peningkatan daya saing ekspor nasional. Artikel-artikel tersebut merupakan pemenang Lomba Karya Ilmiah Ekonomi Mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UI dan Bank Indonesia.

Dalam tulisan pertama, Iggi Haruman Achsien menawarkan penerapan sistem ekonomi yang terkait dengan semangat religius agar manusia terhindar dari keterasingan akibat sekularisme¹. Pemikiran ini didasarkan pada keyakinan bahwa agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia di dunia, termasuk persoalan ekonomi. Ini berarti bahwa kapitalisme religius merupakan pembumian ajaran langit atau pengamalan agama dalam segenap aspek kehidupan manusia. Pandangan ini, menurut penulis, telah berkembang sejak lama dan dapat ditelusuri pada pemikiran para ekonom barat seperti Thomas Aquinas dan Max Weber serta para ekonom Islam seperti Ibn Taymiyya dan Ibn Khaldun.

Kapitalisme religius menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi yang cenderung kapitalistis dengan sistem nilai keagamaan yang bersifat filosofis, moral, dan etis. Kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, alokasi, konsumsi dan distribusi kekayaan akan dituntun oleh etika, moral dan semangat keagamaan. Dengan demikian, kapitalisme religius tidak sekedar mekanisme aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan material dan fisik masyarakat, tetapi juga untuk melengkapi kebutuhan spiritual dan intelektual.

Pandangan Iggi Haruman Achsien mendasarkan kepada nilai-nilai dan filsafat yang secara umum diajarkan oleh hampir semua agama, khususnya agama samawi. Prinsip keadilan, kejujuran, dan kesetaraan serta hal-hal yang "baik" lainnya merupakan pegangan bagi setiap pemeluk agama. Hal ini akan dapat mengarahkan kita bahwa inilah yang harus diterapkan oleh seluruh negara yang masyarakatnya masih mempercayai agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Namun, hal tersebut masih pada tataran filosofis dan diperlukan penelitian dan pengkajian yang panjang untuk penerapannya. Terlebih lagi di Indonesia dengan masyarakatnya yang beragama. Di sektor keuangan, misalnya, bagaimana menerapkan prinsip "keadilan" dalam transaksi antara debitur dan bank. Apakah pembiayaan berdasarkan syariah yang dalam agama Islam dinilai adil bagi kedua belah pihak dapat diterima dan diterapkan bagi seluruh masyarakat termasuk yang bukan beragama Islam. Juga mengenai peranan pemerintah, apakah alokasi sumber daya untuk pemerataan dilakukan dengan pajak dan atau zakat.

Pendekatan Iggi Haruman Achsien dalam menjelaskan kapitalisme religius hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Nanang Eko Ariadi dan Dwi Sugiarto mengenai

1 Iggi Haruman Achsien, *Menuju Kapitalisme Religius ?*, hal. 1

ekonomi Islam². Sistem ekonomi Islam ini diajukan mengingat sistem ekonomi yang diterapkan selama tiga puluh tahun terakhir diterapkan yang sangat liberalis dan nasionalistik-protektif yang ternyata rentan terhadap gejolak. Dalam tulisan kapitalisme religius maupun ekonomi Islam terdapat perpaduan antara paham spiritualisme atau rahbaniyah dengan materialisme atau kebendaan. Penganut spiritualisme lebih menekankan aspek moral dan rohani, sedangkan materialisme lebih mengutamakan kebendaan atau yang bersifat kebutuhan fisik. Dengan demikian, dalam kedua konsep tersebut manusia sebagai pelaku ekonomi tidak sepenuhnya menyerahkan diri dalam spiritualisme yang mengabaikan unsur-unsur kebendaan dan menganggapnya sebagai dosa, maupun mementingkan materi semata yang dapat mendorong praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang pada gilirannya dapat menghancurkan sendi-sendi perekonomian itu sendiri.

Nilai dasar dari sistem ekonomi Islam adalah hak kepemilikan yang terbatas pada sumber-sumber ekonomi, nilai keadilan dan nilai keseimbangan. Ini berbeda dengan aliran kapitalisme maupun Marxisme. Dalam kapitalisme dikenal hak absolut bagi kepemilikan pribadi, kebebasan memasuki semua kegiatan usaha dan transaksi atas dasar persaingan bebas dan penerapan individualisme dan utilitarianisme. Sedangkan dalam marxisme hak milik ada pada rakyat yang diwakili oleh pemerintah sehingga tidak mendorong kreativitas ekonomi rakyat. Sedang dilihat dari nilai instrumentalnya adalah zakat, sistem bagi hasil (non bunga), jaminan sosial, koperasi atau al-musyarakah dan adanya lembaga pengawasan atau hisbah dari pemerintah. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi pemerataan distribusi pendapatan secara terbuka, egaliter, adil dan demokratis dengan tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Mengenai penerapan sistem ekonomi Islam, Nanang berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung antara lain masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan konsentrasi ekonomi rakyat yang sebagian besar masih pada sektor tradisional, serta besarnya kemauan politik dari pemerintah. Mengenai kemauan politik ini perlu dikemukakan bahwa secara legal, penerapan ekonomi Islam telah dimulai pada tahun 1992 yaitu dengan pemberlakuan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memberikan landasan bagi pengembangan bank berdasarkan prinsip syariah. Kelahiran Bank Muamalah Indonesia dan sejumlah BPR Syariah mengacu pada UU tersebut. Selain itu, juga lahir produk asuransi takaful dan lembaga keuangan *Baitul Mal wa Tanwil* (BMT) yang memberikan pembiayaan usaha kecil produktif dengan memanfaatkan dana dari zakat, infak, sedekah, serta pinjaman secara terbatas. Indonesia masih tertinggal cukup jauh dengan Malaysia yang antara lain telah menerapkan *dual banking system* cukup lama dan mengembangkan

2 Nanang E. Ariadi dan Dwi Sugiarto, *Studi Sistem Ekonomi Islam sebagai Sistem Ekonomi Alternatif (Telaah Kritis terhadap Pola Kebijakan Ekonomi Orde Baru)*, hal. 23

Permodalan Nasional Berhad (PNB) yang diadopsi oleh Indonesia dalam bentuk Permodalan Nasional Madani (PNM) yang baru dibentuk tahun ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk menerapkan sistem ekonomi yang berlandaskan syariah masih memerlukan kerja keras dan komitmen semua pihak.

Sementara itu, dua artikel yang ditulis masing-masing oleh Joko Waluyo dan Ledi Trialdi dkk mengulas mengenai kelebihan sistem ekonomi pasar berdasarkan prinsip sosialisme yang dipelopori oleh Karl Marx. Joko Waluyo mengajukan gagasan suatu sistem ekonomi pasar sosial kerakyatan yang sesuai dengan ideologi dan moral bangsa Indonesia³. Sistem ini dipandang memiliki kelebihan dengan sistem ekonomi pasar murni yang mendasarkan pada mekanisme permintaan dan penawaran yang dapat menimbulkan gejolak. Pada pasar sosial kerakyatan, harga ditetapkan Pemerintah dengan memperhatikan daya beli masyarakat dengan mengabaikan biaya produksi yang dikeluarkan. Hal ini berarti bahwa sistem ini memerlukan subsidi yang sangat besar sehingga sulit untuk diberlakukan pada semua jenis barang dan jasa. Dengan pertimbangan tersebut, Joko Waluyo berpendapat bahwa penerapan pasar sosial kerakyatan di Indonesia dilakukan berdampingan dengan penerapan mekanisme pasar murni. Perdagangan barang kebutuhan pokok dilakukan dengan mekanisme pasar sosial kerakyatan, sedangkan untuk barang kebutuhan lainnya serta jasa dilakukan dengan mekanisme pasar bebas.

Untuk menyelaraskan penerapan kedua jenis pasar tersebut secara serasi, dilakukan pembagian tugas diantara badan usaha milik negara (BUMN), koperasi, dan swasta. BUMN akan memproduksi barang kebutuhan pokok yang akan diperdagangkan melalui mekanisme pasar sosial kerakyatan. Koperasi akan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Kelebihan produksi yang dihasilkan koperasi dapat dijual ke pasar bebas. Sementara itu, sektor swasta menghasilkan barang dan jasa di luar kebutuhan pokok di pasar bebas. Ketiga badan usaha tetap didorong untuk berkompetisi untuk mencapai efisiensi. Namun demikian, persaingan tersebut dilakukan dengan semangat gotong royong. Selanjutnya, untuk memberikan perlindungan terhadap yang kalang dalam persaingan, Pemerintah perlu menyediakan sistem pengaman sosial kerakyatan antara lain dalam bentuk perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial.

Pembagian tugas antara BUMN, koperasi, dan swasta mengisyaratkan adanya kesetaraan kemampuan diantara ketiganya. Pengalaman menunjukkan bahwa perkembangan sejumlah BUMN menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan terutama karena inefisiensi. Lembaga pemerintah yang bertugas menangani pengadaan dan penyaluran sejumlah bahan kebutuhan pokok juga sering dikritik oleh sejumlah

3 Joko Waluyo, *Konsep Sistem Ekonomi Pasar Sosial Kerakyatan sebagai Dasar Pemikiran Ekonomi dan Sosial di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, hal. 47.

kalangan termasuk lembaga internasional. Untuk lebih meningkatkan kinerja badan usaha milik pemerintah tersebut telah dilakukan berbagai langkah termasuk swastanisasi yang justru akan memperbesar peranan swasta. Perkembangan koperasi juga masih belum seperti yang diharapkan meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk terus mendorong peranan koperasi dalam perekonomian nasional. Berbagai kendala ini tampaknya sudah disadari oleh penulis dengan mengemukakan sejumlah syarat yang diperlukan untuk menerapkan suatu pasar sosial kerakyatan di Indonesia. Persyaratan tersebut mencakup dukungan ideologi, politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang melibatkan pemerintah dan seluruh masyarakat.

Sementara itu, Ledi Trialdi dkk mengajukan gagasan penerapan sistem ekonomi sosialis pasar di Indonesia melalui suatu transformasi⁴. Gagasan ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu demokrasi ekonomi dengan meminimalkan proses eksploitatif diantara pelaku ekonomi. Pelopor sistem ekonomi sosialisme pasar adalah Oskar Lange yang beranggapan bahwa ekonomi sosialis yang terdesentralisasi tidak akan menimbulkan masalah bagi perusahaan dalam mencapai tingkat harga yang rasional dan alokasi sumber daya secara optimal. Dalam sistem ini, pemerintah menetapkan aturan mengenai keputusan produksi, tingkat bunga dan harga barang input. Sedangkan keputusan mengenai apa, berapa banyak dan bagaimana produksinya masing-masing perusahaan dan industri dengan berpedoman pada mekanisme pasar. Pemikiran Oskar Lange ini, dengan berbagai penyesuaian, telah diterapkan di Yugoslavia dan beberapa negara Eropa Timur.

Kerangka analisis yang digunakan oleh Ledi Trialdi dalam menjelaskan proses transformasi mendasarkan pada pendapat Morris Bernstein yang mengemukakan bahwa untuk menuju sistem ekonomi sosialisme pasar dibutuhkan proses transformasi yang mencakup privatisasi, marketisasi, stabilisasi, dan pembangunan institusi. Privatisasi diperlukan untuk menghilangkan pembatasan dalam kegiatan produksi dan penetapan harga secara irasional dengan mengabaikan kelangkaan sumber daya. Melalui marketisasi, pemerintah menyerahkan transaksi ekonomi pada mekanisme pasar. Stabilisasi diarahkan untuk mencapai stabilitas ekonomi makro yang diperlukan agar sistem sosialisme pasar dapat berjalan secara efektif. Untuk melaksanakan ketiga proses transformasi tersebut diperlukan kelembagaan yang kuat yang akan menjaga agar sistem ekonomi sosialis pasar berjalan. Kelembagaan tersebut mencakup struktur kekuasaan, representasi politik, administrasi negara, lembaga kontrol sosial dan sistem hukum. Makna terpenting dari pembangunan kelembagaan ini menurut penulis adalah adanya pemerintahan yang bersih dan tidak korup yang dapat menciptakan kondisi dan iklim persaingan yang sehat.

4 Ledi Trialdi, I Kadek Sian Sutrisna A., dan Joko Arif, *Transformasi Sistem Ekonomi Indonesia Menuju Sistem Ekonomi Pasar Sosialisme Pasar*, hal. 83

Mengenai sistem ekonomi yang saat ini diterapkan di Indonesia dikemukakan adanya dualisme dimana di satu sisi ada jiwa kekeluargaan dan kebersamaan yang menunjukkan demokrasi ekonomi, sedangkan di sisi yang lain ada sektor swasta dengan semangat liberalis-kapitalis. Kebijakan perekonomian yang ditempuh sejak akhir tahun 1960an telah mendorong peran swasta dalam perekonomian nasional semakin besar. Namun sektor swasta tersebut lebih banyak diwakili oleh perusahaan-perusahaan besar, sementara usaha kecil-menengah belum mengalami perkembangan berarti. Perkembangan ini, menurut penulis, berkaitan dengan masih kurang memadainya pembangunan perangkat kelembagaan yang dapat mengendalikan dan mengatur agar pasar tetap bekerja dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Selain menekankan pentingnya penataan kelembagaan, penulis juga mengemukakan perlunya dilakukan restrukturisasi sistem perekonomian Indonesia secara luas mulai dari restrukturisasi pemilikan dan penguasaan aset ekonomi sampai restrukturisasi budaya yang dapat mendukung proses demokratisasi ekonomi seperti yang disarankan oleh Sri Edi Swasono. Dengan demokratisasi ekonomi ini diharapkan lahir perusahaan-perusahaan swasta yang bekerja dengan mekanisme pasar dengan tetap dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan kebersamaan seperti yang berlaku pada bentuk usaha koperasi.

Dalam tulisan terakhir, Budi Siswanto dan Priyatno menganalisa perkembangan ekspor Indonesia, permasalahan yang dihadapi, serta strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan daya saing produk yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja ekspor Indonesia⁵. Analisis daya saing ekspor Indonesia dilakukan dengan menggunakan hasil studi Michael Porter terhadap sepuluh negara industri yang menyimpulkan bahwa daya saing suatu negara di pasar internasional ditentukan oleh 4 faktor. Keempat faktor tersebut adalah kondisi faktor produksi yang mencakup sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya pengetahuan, sumber daya modal, dan sumber daya infrastruktur; kondisi permintaan yang meliputi komposisi, tingkat dan pola permintaan domestik serta kecenderungan permintaan internasional; industri pendukung dan terkait; dan strategi perusahaan, struktur dan pesaing. Dengan menggunakan keempat faktor sebagai kriteria, penulis menyimpulkan bahwa daya saing Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara pesaing.

Dari analisis tersebut, strategi peningkatan daya saing dan kinerja ekspor yang cocok bagi Indonesia adalah strategi agresif atau penyerangan melalui peralihan kesempatan yang ada dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan. Maksudnya berusaha menembus pasar yang belum digali dan melayani segmen pasar kecil terutama ke negara-negara yang belum menjadi mitra (penetrasi pasar). Tentunya dengan menjaga kualitas dan harga yang mampu

5 Budi Siswanto dan Priyatno, *Peningkatan Daya Saing Produk dan Kinerja Ekspor Indonesia dalam Rangka Pemulihan Perekonomian Indonesia*, hal. 99

bersaing dengan negara lain. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mendukung penetrasi yakni: dukungan *trade financing* yang bisa menopang aktivitas ekonombumi dunia usaha, kegiatan promosi ke mancanegara mengenai berbagai produk-produk ekspor unggulan, perlunya verifikasi produk ekspor, optimalisasi penggunaan fasilitas ekspor yang diberikan oleh negara-negara importir, perlu dirangsang iklim kondusif yang menunjang ekspor, kerjasama yang erat antara pemerintah dan dunia usaha, deregulasi dalam bidang transportasi laut, memperbaiki komposisi ekspor, dan memperbaiki struktur industri.

Langkah-langkah operasional yang perlu dilakukan untuk mendukung strategi tersebut di atas adalah: menyiapkan dukungan admisnistartif, penurunan suku bunga bank, mewirusahaakan birokrasi pemerintah, memanfaatkan informasi dari pemerintah, kerjasama pemasaran, sistem bapak angkat, penerapan teknologi yang tepat guna, memperhatikan kualitas produk, peningkatan pengetahuan eksportir dan penyebaran informasi peluang ekspor.

Sebagai penutup, kiranya tidak berlebihan bila dikemukakan bahwa pandangan kritis dan jernih dari para penulis akan menambah wacana pemikiran bagi perumus kebijakan ekonomi dan peneliti ekonomi di lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Perbedaan pandangan para penulis dengan pemikiran yang selama ini dianggap "pakem" diharapkan dapat lebih mendorong upaya penelitian dan pengkajian terus menerus mengenai penyempurnaan strategi pembangunan ekonomi selama ini. Perkembangan yang pesat di bidang teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan informasi, memberikan dampak terhadap semakin kompleksnya permasalahan ekonomi yang harus dipelajari dan dihadapi. Dalam kaitan ini, perlu direnungkan ungkapan dua ekonom bersaudara dari Amerika Serikat, Paul dan Ronald Wonnacott, yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi ibarat musik karya Mozart. Pada suatu tingkat tertentu sangat sederhana sehingga ide dasarnya mudah dicerna dan dinikmati. Namun di balik permukaan tersebut, terdapat masih banyak fenomena yang harus digali dan dipahami, termasuk oleh orang yang seluruh waktunya diabdikan untuk mendalaminya.